

**ANALISIS KOMPARASI BIAYA TRANSAKSI PADA
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MODEL *GRAMEEN*
BANK DAN MODEL KOPERASI KREDIT
(STUDI PADA PT “A” DAN KOPERASI KREDIT “B”
DI KABUPATEN MALANG)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Ana Fitrotul Mu’arofah
115020100111005**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul:

“ANALISIS KOMPARASI BIAYA TRANSAKSI PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MODEL *GRAMEEN BANK* DAN MODEL KOPERASI KREDIT (STUDI PADA PT “A” DAN KOPERASI KREDIT “B” DI KABUPATEN MALANG)”

Yang disusun oleh:

Nama : Ana Fitrotul Mu’arofah

NIM : 115020100111005

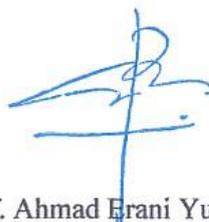
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa Artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Maret 2015.

Malang, 23 Maret 2015

Dosen Pembimbing,



Prof. Ahmad Erani Yustika, SE., M.Sc., Ph.D.

NIP. 19730322 199702 1 001

**ANALISIS KOMPARASI BIAYA TRANSAKSI PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
MODEL *Grameen Bank* DAN MODEL KOPERASI KREDIT
(STUDI PADA PT “A” DAN KOPERASI KREDIT “B” DI KABUPATEN MALANG)**

Ana Fitrotul Mu’arofah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Email: ana_fm93@yahoo.com

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki peran sebagai salah satu alat pembangunan yang paling efektif untuk mengurangi masalah kemiskinan akibat rendahnya akses modal finansial. Peran ini semakin memperkuat alasan pentingnya menjaga efisiensi LKM agar tetap sustainable. Yustika (2013) menyatakan bahwa efisien tidaknya desain kelembagaan suatu organisasi atau unit bisnis dapat diukur menggunakan suatu alat analisis yaitu biaya transaksi. Karena itulah, penelitian ini dilakukan untuk melihat perbandingan biaya transaksi antara dua model LKM yakni model Grameen Bank (PT “A”) dan Koperasi Kredit (Kopdit “B”), sehingga nantinya diketahui model LKM mana yang lebih efisien. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan statistik deskriptif. Komponen biaya transaksi dalam penelitian ini terdiri dari biaya screening, biaya administrasi, biaya monitoring, dan biaya penegakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total biaya transaksi pada Kopdit “B” yang menerapkan model Koperasi Kredit lebih tinggi daripada total biaya transaksi pada PT “A” yang menerapkan model Grameen Bank. Hal ini mengindikasikan bahwa PT “A” (model Grameen Bank) lebih efisien daripada Kopdit “B” (model Koperasi Kredit).

Kata kunci: *Biaya Transaksi, Grameen Bank, Koperasi Kredit, Lembaga Keuangan Mikro, Ekonomi Kelembagaan*

A. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro atau sering singkat sebagai LKM merupakan lembaga yang menyediakan pelayanan keuangan bagi masyarakat atau pelaku usaha kecil. Lembaga ini berperan sebagai salah satu alat pembangunan yang paling efektif untuk mengurangi masalah kemiskinan akibat rendahnya akses modal finansial (Hadinoto & Retnadi, 2007). Keberhasilan LKM dalam mencapai tujuan pembangunan juga telah terungkap dalam berbagai studi sejak 1990an (Morduch, 1999; Cohen, 1999; Robinson, 2001; Yahaya, *et al*, 2011)

Salah satu model LKM yang dianggap berhasil dan melegenda adalah lembaga keuangan (mikro) di Bangladesh yaitu *Grameen Bank* (GB) (Yustika, 2013; Ferdousi, 2013; Syarif, 2006). LKM ini didirikan oleh Muhammad Yunus karena rasa kecewanya terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan, yang menganggap orang miskin tidak potensial untuk menjadi nasabah bank. Keberhasilan *Grameen Bank* rupanya telah menginspirasi hampir 130 negara termasuk Indonesia, untuk menerapkan model serupa (Syarif, 2006).

Selain model *Grameen Bank*, LKM di Indonesia juga banyak yang menggunakan model koperasi, salah satunya adalah koperasi kredit. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki koperasi terbanyak di dunia, yaitu sekitar 200.818 koperasi pada 2013 (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2013). Koperasi Kredit merupakan LKM yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam suatu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan diantara sesama mereka untuk tujuan produktif dan kesejahteraan anggotanya (Deputi Bidang Pengkajian dan Sumberdaya UKMK, 2008).

Dua model LKM yang telah dijelaskan sebelumnya, baik model *Grameen Bank* maupun model Koperasi Kredit sama-sama memiliki peran yang besar dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia melalui penyaluran kredit mikro. Menurut Salam (2008), pentingnya peran LKM ini semakin memperkuat alasan untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) LKM agar selalu dapat melayani jasa keuangan masyarakat miskin yang tidak tersentuh oleh layanan perbankan. Salah satu kunci utama untuk menjaga *sustainability* usaha tersebut adalah LKM harus bisa efisien. Yustika (2013) menyatakan bahwa efisien tidaknya desain kelembagaan suatu organisasi atau unit bisnis dapat diukur menggunakan suatu alat analisis yaitu biaya transaksi. Biaya transaksi yang tinggi mengindikasikan bahwa desain kelembagaan yang digunakan tidak efisien, sebaliknya biaya transaksi yang rendah menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang digunakan telah efisien.

Beberapa studi yang dilakukan oleh Khandker (2005) & Gertler *et al* (2003) membuktikan bahwa program keuangan mikro efektif dan efisien dalam mengurangi kemiskinan, salah satu contohnya adalah model *Grameen Bank* yang telah dijelaskan sebelumnya (Ali & Rahman, 2013). Namun demikian, ada studi lain yang mengatakan bahwa LKM cenderung mengeluarkan biaya transaksi yang tinggi (Hossain & Diaz, 1999; Shankar, 2007; Cull *et.al*, 2009). Hal ini tentu mengindikasikan bahwa LKM tidak bekerja secara efisien.

Model *Grameen Bank* memiliki biaya transaksi yang tinggi, begitu pula dengan model Koperasi Kredit. Permasalahan ini membuat peneliti tertarik untuk membandingkan biaya transaksi antara kedua model LKM tersebut, sehingga nantinya akan diketahui model LKM mana yang lebih efisien.

B. KAJIAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan Mikro

Keuangan mikro merupakan jasa keuangan dalam jumlah kecil, baik berupa pinjaman, tabungan, asuransi maupun *transfer* uang yang diberikan kepada orang atau pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan lembaga yang menyediakan jasa keuangan tersebut disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (Nugroho, 2011).

Indonesia merupakan salah satu Negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro secara komersial di Asia (Banking with the Poor Network, 2009). Ada empat macam lembaga keuangan mikro (LKM) yang ada di Indonesia, yaitu: 1) LKM formal, baik bank maupun nonbank, 2) LKM nonformal, baik yang berbadan hukum atau tidak, 3) LKM yang dibentuk melalui program pemerintah, dan 4) LKM informal, seperti arisan, rentenir, dan sebagainya (Usman, dkk, 2004).

Grameen Bank

Grameen Bank atau Bank Desa di Bangladesh didirikan oleh Muhammad Yunus sebagai protes atas sistem perbankan dan perkreditan yang berlaku di negaranya pada khususnya dan di dunia pada umumnya (Zain, 1998). *Grameen Bank* merupakan salah satu model LKM yang digunakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan.

Grameen Bank memiliki beberapa prinsip, diantaranya adalah kredit yang disalurkan hanya untuk orang miskin, kredit modal harus digunakan untuk kegiatan produktif, kredit diberikan tanpa jaminan maupun pihak penjamin, tidak ada sanksi hukum apabila anggota tidak mampu mengangsur atau mengembalikan pinjaman, dan apabila anggota wafat, dan anggota keluarganya tidak mampu membayar, sisa pinjaman dihibahkan (Zain, 1998). Prinsip-prinsip tersebut sangat berbeda dengan prinsip bank konvensional pada umumnya.

Tujuan dan target *Grameen Bank* (Maika & Kiswanto, 2007) adalah:

1. Memberikan layanan keuangan kepada orang miskin, terutama perempuan
2. Mendorong tumbuhnya *self-employment*
3. Melepaskan kaum marginal yang tidak beruntung, terutama perempuan, dan mendorong mereka untuk lebih memiliki jaringan dalam format pengorganisasian yang rapi
4. Mengurangi eksploitasi terhadap orang miskin dari rentenir
5. Memutus lingkaran setan kemiskinan.

Koperasi Kredit

Koperasi kredit merupakan salah satu jenis koperasi. Menurut Puskopsitbag (Pusat Koperasi Kredit Bali Artha Guna), koperasi kredit merupakan badan usaha yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam suatu ikatan pemersatu, yang bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan di antara sesama mereka dengan bunga yang layak serta untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Prinsip koperasi kredit ada tiga, yakni a) tabungan hanya diperoleh dari anggota-anggotanya, b) pinjaman hanya diberikan kepada anggota-anggotanya saja, dan c) jaminan terbaik bagi pinjaman adalah watak si peminjam itu sendiri. Tujuan pendirian koperasi kredit juga ada tiga, yaitu a) membimbing dan mengembangkan sikap “hemat” di antara para anggotanya; sehingga efisien dan efektifitas usaha tercapai, b) memberikan pinjaman layak, tepat, cepat dan terarah, c) mendidik anggota dalam menggunakan uang secara bijaksana (Puskopsitbag).

Ekonomi Kelembagaan

Menurut Rossiaud & Locatelli (2010), ekonomi kelembagaan menawarkan kerangka teoritis untuk mempelajari institusi domestik dan organisasi yang berlaku dalam suatu perekonomian. Analisis kelembagaan sendiri mempelajari bagaimana lembaga dibentuk dan berfungsi. Selain itu, kelembagaan juga menentukan siapa yang memiliki akses ke suatu sumber daya dan kekuatan untuk mengambil keputusan (Angelsen, *et al*, 2010). Dari hal ini bisa disimpulkan bahwa kelembagaan merupakan suatu aturan seperti yang diungkapkan oleh North (1991) bahwa kelembagaan merupakan aturan yang membatasi manusia dari perilaku menyimpang untuk membangun struktur interaksi ekonomi, politik, dan sosial.

Dalam prakteknya, kelembagaan yang tersedia dalam kegiatan ekonomi akan menentukan seberapa efisien hasil ekonomi yang diperoleh serta proporsi distribusi ekonomi yang diterima masing-masing pelaku ekonomi. Sehingga bisa dikatakan kelembagaan berpengaruh terhadap pencapaian hasil-hasil ekonomi. Wibowo (2009) menegaskan bahwa pendekatan kelembagaan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumberdaya.

Pada intinya, kelembagaan saat penting didalam pertukaran atau transaksi, karena dapat mengurangi ketidakpastian. Hal ini ditegaskan oleh Angelsen, *et al* (2010) yang menyebutkan bahwa salah satu persoalan utama dalam kelembagaan adalah biaya transaksi. Adanya kelembagaan yang baik diharapkan dapat mereduksi informasi asimetris yang biasa ada dalam pasar sehingga biaya transaksi juga akan berkurang. Dari hal ini bisa disimpulkan bahwa kelembagaan yang baik akan mengurangi biaya transaksi dan pada akhirnya terjadi efisiensi ekonomi.

Biaya Transaksi

Biaya transaksi merupakan salah satu alat analisis dalam ilmu ekonomi kelembagaan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu desain kelembagaan. Semakin tinggi biaya transaksi yang terjadi dalam suatu kegiatan ekonomi (transaksi), berarti kelembagaan yang didesain juga semakin tidak efisien, begitu juga sebaliknya (Yustika, 2012). Dalam pemikiran Ekonomi Kelembagaan Baru (*New Institutional Economics*), teori biaya transaksi merupakan konsep penjelas yang sangat penting dalam mempelajari institusi dan organisasi (Meramveliotakis dan Milonakis, 2010). Biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat terjadinya pertukaran ekonomi (Swamy and Tulasimala, 2011). Oleh karena itu, unit analisis dalam biaya transaksi adalah transaksi itu sendiri (Williamson, 2007).

Teori Biaya Transaksi pertama kali dikembangkan oleh Ronald Coase dalam *The Nature of The Firm* (1937). Coase (1937) menjelaskan bahwa biaya transaksi merupakan biaya-biaya dari penggunaan mekanisme harga, yang meliputi biaya-biaya dalam menemukan harga yang relevan, biaya negosiasi, dan menandatangani kontrak. Namun demikian, artikel tersebut ternyata kurang menjelaskan maksud dan arti dari konsep biaya transaksi yang ingin dijelaskan oleh Coase. Hal ini mengakibatkan banyak literatur yang coba membahas mengenai teori ekonomi biaya transaksi, sering menampilkan adanya kontradiksi antara satu sama lain (Fox, 2007). Hal yang sama diungkapkan pula oleh Meramveliotakis dan Milonakis (2010:1047), yang menyatakan bahwa konsep biaya transaksi masih menyisakan kesamaran dan kesulitan dalam memahami definisinya.

Adanya hambatan dalam analisis biaya transaksi, nyatanya tidak membuat para ilmuwan atau peneliti untuk berhenti membahas mengenai masalah biaya transaksi, bahkan saat ini berbagai pembahasan mengenai masalah tersebut muncul dalam berbagai kegiatan. Menurut Williamson (2007:20), biaya transaksi digunakan untuk menjelaskan beberapa hal mengenai perbedaan perilaku, dimana transaksi digambarkan bukan sekedar kegiatan membeli dan menjual tetapi juga interaksi emosional dari hari ke hari serta pertukaran kebutuhan secara informal. Asumsi biaya transaksi ada dua yaitu rasionalitas terbatas dan perilaku oportunistik (Meramveliotakis dan Milonakis, 2010:1057). Sedangkan faktor-faktor penentu biaya transaksi adalah frekuensi, spesifisitas, ketidakpastian, rasionalisasi yang terbatas, dan perilaku oportunistik. Sejalan dengan Williamson, Swamy and Tulasimala (2011:60) juga mengatakan bahwa saat ini teori biaya transaksi tidak hanya dibahas dalam lingkup jual dan beli saja, namun sudah mencakup kegiatan yang lain, salah satunya dalam kegiatan pinjaman.

Kegiatan pinjaman yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui lembaga keuangan mikro (LKM). Oleh karena itu, kegiatan ini harus berlangsung secara efisien. Untuk melihat efisiensi tersebut, beberapa ilmuwan telah membahas biaya transaksi dalam kegiatan pinjaman yang dilakukan oleh LKM, baik dari sisi peminjam (*borrower*) ataupun dari sisi pemberi pinjaman (*lender*).

Dari sisi peminjam, penelitian biaya transaksi pernah dilakukan oleh Hosseini, *et al* (2012), Igwe & Egbuson (2013) dan Dehem & Hudon (2013), sedangkan penelitian dari sisi pemberi pinjaman pernah dilakukan oleh Shankar (2007). Shankar menjelaskan bahwa biaya transaksi dalam kelompok/organisasi kredit mikro terbagi menjadi dua yaitu biaya transaksi langsung dan biaya transaksi tidak langsung. Biaya transaksi langsung terdiri dari biaya pembentukan kelompok, pelatihan, administrasi kredit dan *monitoring*, sedangkan biaya transaksi tidak langsung meliputi biaya tetap yang dialokasikan dari kantor cabang, kantor regional dan kantor pusat, penyusutan dan biaya perpajakan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparasi yakni membandingkan dua LKM (PT "A" Cabang Pakis dan Kopdit "B"). PT "A" merupakan replikator *Grameen Bank* terbesar di Indonesia, sedangkan Kopdit "B" merupakan satu-satu Kopdit yang berada 1 gedung dengan Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Wilayah Jawa Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran sekuensial/bertahap dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Creswell (2010), metode sekuensial merupakan strategi bagi peneliti untuk menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu

- 1) tahap pertama, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui prosedur operasional kegiatan pinjaman (kredit) dan mengetahui komponen biaya transaksi yang dikeluarkan dalam kegiatan tersebut. Komponen biaya transaksi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Shankar (2007) yakni a) biaya *screening*, b) biaya administrasi, c) biaya *monitoring*, dan d) biaya penegakan. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, sedangkan untuk menguji validitas datanya, peneliti menggunakan triangulasi.
- 2) tahap kedua, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk membandingkan jumlah biaya transaksi antara dua LKM yakni PT "A" dan Kopdit "B". Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan adalah statistik deskriptif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Terdapat dua LKM yang dijadikan sebagai objek penelitian yakni PT "A" dan Kopdit "B". PT "A" merupakan lembaga keuangan mikro yang mengadopsi sistem *Grameen Bank*. LKM ini memiliki 260 cabang yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satunya berada di kecamatan Pakis Kabupaten Malang. LKM ini mempunyai tujuan sosial yaitu memberikan akses modal kerja

yang terjangkau kepada keluarga yang berpendapatan rendah di Indonesia secara langsung dan berkesinambungan, demi mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup.

Kopdit “B” merupakan lembaga keuangan non bank yang beroperasi sebagai penyedia sarana pemberian pinjaman bagi masyarakat menengah kebawah di sekitar Dusun Sonotengah Kecamatan Pakisaji. Kopdit “B” menyelenggarakan usaha dengan menghimpun simpanan serta memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggota. Selain itu, Kopdit “B” juga memberikan layanan keuangan seperti memberikan dana perlindungan atas simpanan dan pinjaman anggota serta dana sosial duka kepada keluarga anggota inti

Prosedur Kegiatan Pinjaman

Dalam kegiatan pelayanan pinjaman (kredit) terdapat prosedur-prosedur yang dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan pinjaman agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan. Berikut ini prosedur kegiatan pinjaman pada PT “A”:

1. Sosialisasi calon peminjam (calon anggota) dengan melakukan sosialisasi keliling dan sosialisasi Pra-Persiapan Wajib Kumpulan (PWK)
2. Uji Kelayakan Anggota (UKA) melalui dua tahap yaitu a) penilaian kondisi kelayakan rumah, dan b) pendataan usaha dan perkiraan pendapatan
3. Pelatihan Persiapan Wajib Kumpulan (PWK)
4. Pengajuan permohonan pinjaman, penandatanganan perjanjian, dan pencairan pinjaman
5. Pertemuan mingguan kumpulan untuk pembayaran angsuran pinjaman
6. Kunjungan anggota dan pengawasan pinjaman

Sedangkan prosedur kegiatan pinjaman pada Kopdit “B” adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan pinjaman oleh calon peminjam
2. Survei dan analisa permohonan pinjaman
3. Evaluasi permohonan pinjaman
4. Pencairan pinjaman
5. *Monitoring* pinjaman

Komponen Biaya Transaksi pada Proses Kegiatan Pinjaman

Penentuan komponen biaya transaksi memang sangat kompleks, namun didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Shankar untuk menganalisis transaksi pada kegiatan pinjaman (kredit) PT “A” dan Kopdit “B”, maka komponen biaya transaksi pada proses kegiatan pinjaman (kredit) tersebut dapat dibedakan menjadi 5 komponen utama yaitu

1. Biaya *Screening* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh LKM dalam melakukan *screening* untuk mendapatkan anggota (peminjam) yang potensial. Biaya ini terdiri dari biaya informasi dan biaya pembentukan kelompok dan pelatihan
2. Biaya Administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan LKM untuk melakukan penilaian, dokumentasi, pencairan, waktu petugas lapangan, dan pengawasan oleh Kepala Cabang (Shankar, 2007).
3. Biaya *Monitoring* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh LKM untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan.
4. Biaya penegakan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh LKM untuk melakukan penegakan akibat adanya penyimpangan pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan oleh anggota (peminjam).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka komponen biaya transaksi yang lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1: **Komponen Biaya Transaksi**

Komponen Utama Biaya Transaksi	Biaya Transaksi PT “A”	Biaya Transaksi Kopdit “B”
1. Biaya <i>Screening</i>		
a) Biaya Informasi	- Biaya Uji Kelayakan Anggota	- Biaya Survei dan analisa
b) Biaya Pembentukan Kelompok & Pelatihan	- Biaya Pelatihan Persiapan Wajib Kumpulan	- (tidak ada)
2. Biaya Administrasi		

Komponen Utama Biaya Transaksi	Biaya Transaksi PT “A”	Biaya Transaksi Kopdit “B”
a) Biaya Penilaian	- Biaya tes pengesahan dan rapat penilaian	- Biaya untuk Evaluasi Panitia kredit
b) Biaya dokumen/formulir pinjaman		
c) Biaya Pencairan		
d) Waktu Administrasi	- Waktu pembuatan laporan keuangan	- Waktu pembuatan laporan keuangan
3. Biaya Monitoring		
a) Biaya Kunjungan	- Biaya kunjungan anggota yang tidak hadir	- (tidak ada)
b) Biaya pemeriksaan usaha	- Biaya pemeriksaan usaha	- (tidak ada)
c) Biaya Pengawasan oleh KC/Pengawas	- Biaya <i>Surprise Visit</i>	- Biaya pengawasan
4. Biaya Penegakan		
a) Biaya Penagihan atau Peringatan	- Biaya untuk menagih pembayaran pinjaman	- Biaya untuk menagih pembayaran pinjaman
b) Biaya penegakan oleh KC/manajer	- Biaya kunjungan KC	(tidak ada)
c) Biaya Pelaporan	- Biaya untuk melapor ke Kepala desa, RW, RT dan Kantor Pusat	- Biaya penegakan lembaga hukum

Sumber: Pengolahan data oleh peneliti (2015)

Perbandingan Biaya Transaksi PT “A” dan Koperasi Kredit “B”

PT “A” dan Kopdit “B” merupakan dua LKM yang memberikan pelayanan pinjaman dengan sistem yang berbeda. PT “A” menggunakan sistem *Grameen Bank* yang diadopsi dari Negara Bangladesh, sedangkan Koperasi Kredit “B” menggunakan sistem Koperasi Kredit. Perbedaan sistem ini tentu berdampak pada prosedur kegiatan pinjaman yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Tidak hanya itu, perbedaan sistem kegiatan pinjaman tersebut juga mempengaruhi biaya transaksi yang dikeluarkan oleh kedua LKM. Berikut ini perbandingan biaya transaksi antara sistem *Grameen Bank* yang dijalankan oleh PT “A” dengan sistem Koperasi Kredit yang digunakan oleh Kopdit “B”:

Tabel 2: Biaya Transaksi PT “A” dan Kopdit “B”

Komponen Biaya Transaksi	Jumlah Biaya Per Anggota			
	PT “A”	%	Kopdit “B”	%
1. Biaya <i>Screening</i>	Rp 90.211,-	34,69	Rp 21.697,-	4.14
2. Biaya Administrasi	Rp 34.563,-	13,29	Rp 21.318,-	4.06
3. Biaya <i>Monitoring</i>	Rp 68.533,-	26.36	Rp 5.368,-	1.03
4. Biaya Penegakan	Rp 66.722,-	25.66	Rp 475.970,-	90.77
Total Biaya Transaksi	Rp 260.029,-	100	Rp 524.353,-	100

Sumber: Pengolahan data oleh peneliti (2015)

Berdasarkan Tabel 1.2, komponen biaya transaksi yang paling besar pada PT “A” adalah biaya *screening* sebesar 34,69% dari total biaya transaksi, dan yang paling kecil adalah biaya administrasi yakni 13,29% dari total biaya transaksi. Sedangkan pada Kopdit “B”, komponen biaya transaksi yang paling besar adalah biaya penegakan yang proporsinya mencapai

90,77% dari total biaya transaksi, sedangkan komponen yang paling kecil adalah biaya *monitoring* yang menyumbang sebesar 1,03% dari total biaya transaksi.

Berdasarkan Tabel 1.2, diketahui bahwa total biaya transaksi yang dikeluarkan oleh Kopdit “B” dalam kegiatan pinjaman lebih besar daripada biaya transaksi yang dikeluarkan oleh PT “A”. PT “A” hanya mengeluarkan biaya transaksi sebesar Rp 260.029,- per anggota, sementara Kopdit “B” harus mengeluarkan biaya transaksi lebih dari 2 kali lipat dibandingkan biaya LKM tersebut yakni sebesar Rp 524.353,- per anggota. Hasil ini mengindikasikan bahwa PT “A” yang menerapkan sistem *Grameen Bank* lebih efisien daripada Kopdit “B” yang menerapkan sistem Koperasi Kredit. Biaya transaksi yang tinggi mengindikasikan bahwa desain kelembagaan yang digunakan tidak efisien, sebaliknya biaya transaksi yang rendah menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang digunakan telah efisien.

Dalam Tabel 1.2, terlihat jelas bahwa biaya penegakan pada Kopdit “B” mempunyai proposorsi yang sangat besar pada total biaya transaksi (90,77%). Hal inilah yang membuat biaya transaksi pada Kopdit “B” jauh lebih besar daripada PT “A” (25,66%), padahal apabila dilakukan analisis berdasarkan setiap komponen biaya transaksi, tiga dari empat komponen biaya transaksi yakni biaya *screening*, biaya administrasi, dan biaya *monitoring* pada Kopdit “B” lebih rendah daripada PT “A”. Biaya *screening* dan biaya *monitoring* yang dikeluarkan PT “A” bahkan berkali lipat dibandingkan Kopdit “B”. Seperti yang diketahui, tidak agunan/jaminan dalam kegiatan pinjaman PT “A”, sehingga LKM ini harus melakukan *screening* dan *monitoring* yang lebih *intens* daripada Kopdit “B” agar penyimpangan pinjaman bisa diminimalisir. Berbeda dengan PT “A”, dalam kegiatan pinjaman, Kopdit “B” mensyaratkan adanya jaminan yang terkadang membutuhkan jasa notaris. Hal inilah yang membuat biaya penegakan Kopdit “B” lebih besar, karena dibutuhkan proses hukum untuk menangani masalah kredit macet dan jaminan yang sudah dijanjikan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur kegiatan pinjaman pada PT “A” terdiri dari: a) sosialisasi calon anggota (calon peminjam); b) Uji Kelayakan Anggota (UKA); c) Pelatihan Persiapan Wajib Kumpulan (PWK); d) pengajuan, perjanjian, dan pencairan pinjaman; e) pertemuan mingguan kumpulan; f) kunjungan & pengawasan. Sedangkan prosedur kegiatan pinjaman pada Kopdit “B” terdiri dari: a) pengajuan permohonan pinjaman; b) survei & analisa; c) evaluasi permohonan pinjaman; d) pencairan pinjaman; e) *monitoring* pinjaman.
2. Komponen utama biaya transaksi pada kegiatan pinjaman pada PT “A” dan Kopdit “B” adalah biaya *screening*, biaya administrasi, biaya *monitoring*, dan biaya penegakan.
3. Total biaya transaksi Kopdit “B” lebih tinggi daripada total biaya transaksi PT “A”. Hal ini disebabkan oleh adanya penegakan kredit macet melalui proses hukum sehingga biaya penegakan Kopdit “B” jauh lebih besar jika dibandingkan PT “A”.

Saran

Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Biaya transaksi terbesar pada PT “A” terletak pada biaya pembentukan kelompok dan pelatihan yang dilakukan selama empat hari berturut-turut. Untuk menekan biaya ini, PT “A” sebenarnya bisa mengubah jumlah hari yang digunakan dari empat hari menjadi tiga hari saja, dengan catatan peserta/anggota yang mengikuti latihan bisa berperan aktif dalam kegiatan pelatihan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kopdit “B” yang menerapkan model Koperasi Kredit dalam kegiatan pinjamannya ternyata memiliki biaya transaksi yang 2 kali lipat lebih tinggi daripada PT “A” yang menerapkan model *Grameen Bank*. Dari hasil ini dan berdasarkan sudut pandang biaya transaksi, peneliti menyarankan agar Kopdit “B” menerapkan model *Grameen Bank* dalam kegiatan pinjamannya
3. Penelitian ini hanya berasal dari satu sisi saja yakni pemberi pinjaman. Hal ini dikarenakan data mengenai anggota baik Kopdit “B” maupun PT “A” bersifat rahasia, sehingga peneliti tidak bisa mengetahui dan melakukan penelitian pada anggota masing-masing LKM ini.

Apabila memungkinkan, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian biaya transaksi dari sisi peminjam atau dari dua sisi sekaligus yakni sisi peminjam dan pemberi pinjaman, sehingga nantinya efisiensi dari dua model LKM tersebut bisa diketahui secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Norli & Rashidah, Abdul Rahman. 2013. Financing the poor, sustaining the provider: issue on transaction cost in microfinance program. *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol.8, (No.4): 512-516
- Angelsen, A., Brockhaus, M., Kanninen, M., Sunderlin, W.D., Wertz-Kanounnikoff, S. 2010. *Memwujudkan REDD+: Strategi Nasional dan Berbagai Pilihan Kebijakan*. Bogor Barat: CIFOR
- Banking with the Poor Network. 2009. Laporan Industri Keuangan Mikro di Indonesia
- Coase, Ronald H. 1937. The Nature of the Firm. *Economica*, Vol.4 : 386-405
- Cohen, Monique.1999. Microfinance Impact Evaluation: Going Down Market. *Paper Prepared for Conference on Evaluation and Poverty Reduction World Bank*
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Cull, Robert, Asli, Demirgüç-Kunt & Jonathan, Morduch. 2009. "Microfinance Meets the Market". *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 23, (No.1): 167-192
- Dehem, Hibaut & Marek Hudon. 2013. Microfinance from the Clients' Perspective: An Empirical Enquiry into *Transaction Costs in Urban and Rural India*. *Working Paper*
- Deputi Bidang Pengkajian dan Sumber Daya UKM. 2008. *Laporan Analisa Komparatif Antara Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Dan Koperasi Kredit (Kopdit)*
- Djumilah, Zain. 1998. *Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Bantuan Modal Bagi Rumah Tangga Miskin di Pedesaan*. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya
- Ferdousi, Farhana. 2013. Performance of Microfinance Institutions in Asia: DEA based efficiency analysis. China: Atlantis Press. *International Conference on the Modern Development of Humanities and Social Science (MDHSS)*
- Fox, Glenn. 2007. The Real Coase Theorems. *Cato Journal*, Vol. 27, (No. 3):373-396
- Hadinoto, Soetanto & Djoko, Retnadi. 2007. *Micro Credit Challenge: Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Hossain, Mahabub & Catalina, P Diaz. 1999. Reaching the poor with effective microcredit: evaluation of a grameen bank replication in the philippines. *Paper presented during the International workshop on Assessing the Impact of Agricultural Research on Poverty Alleviation*. California: International Center for Tropical Agriculture
- Hosseini, S. S., Khaledi, M., Ghorbani, M. & Brewin, D. G.. 2012. An analysis of transaction costs of obtaining credits in rural Iran. *Journal Agr. Sci. Tech.*, Vol. 14: 243-256
- Igwe & Egbuson. 2013. Determinants of transaction costs for borrowers among farmers in Ikwano Local Government area, Abia State, Nigeria. *American Journal of Rural Development*, Vol. 1, (No. 5): 116-120
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2013. *2014, Dua Koperasi Ditargetkan Masuk 300 Elite Dunia*. http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1370:2014-dua-koperasi-ditargetkan-masuk-300-elite-dunia&catid=50:bind-berita&Itemid=97 diakses pada Maret 2015
- Maika, Amelia & Eddy, Kiswanto. 2007. *Pemberdayaan Perempuan Miskin pada Usaha Kecil di Pedesaan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro (Grameen Bank)*. Disampaikan dalam seminar Bulanan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Kamis 26 April 2007
- Meramveliotakis, Giorgos dan Dimitris Milonakis. 2010. Surveying the Transaction Cost Foundations of New Institutional Economics: A Critical Inquiry. *Journal of Economic Issues*, Vol. 44, (No. 4):1045-1071. http://www.researchgate.net/profile/Dimitris_Milonakis/publication/227454162_Surveying

[the Transaction Cost Foundations of New Institutional Economics A Critical Inquiry/links/02bfe513e7627d63f1000000.pdf](https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.03.001) diakses pada 8 Maret 2014

- Morduch, Jonathan. 1999. The Microfinance Promise. *Journal of Economic Literature*, Vol.37: 1569–1614
- North, Douglass C. . 1991. Institutions. *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 5, (No. 1): 97-112
- Nugroho, Agus Eko. 2011. *Kebijakan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro: Urgensi dan Permasalahannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
- Pusat Koperasi Kredit Bali Artha Guna. *Buku Dasar-Dasar Manajemen Koperasi Kredit (Credit Union)*. Jakarta: Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT) Dan *Credit Union Central Of Indonesia* (CUCO Indonesia)
- Robinson, Marguerite. 2001. The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor. *Journal of Asian Economics*, Vol.13, Issue 1: 123-124
- Rossiaud, Sylvain & Catherine, Locatelli. 2010. Institutional Economics. *POLINARES working paper*
- Salam, Abdul. 2008. *Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro: Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM
- Shankar, Savita. 2007. Transaction Costs In Group Microcredit In India. *Journal Management Decision*, Vol. 45, (No. 8): 1331-1342
- Swamy, Vighneswara & B. K. Tulasimala. 2011. Financial Intermediaries and Economic Development: Evidence on Transaction Costs of Borrowing by the Poor. *International Journal of Banking and Finance*. Vol.8, (No.3): 54-72. <http://epublications.bond.edu.au/ijbf> diakses pada 8 Maret 2015
- Syarif, Teuku. 2009. Grameen Bank Membuktikan Perempuan dan Orang Termiskin dari yang Miskin Punya Potensi untuk Diberdayakan. *Jurnal Infokop*, (No.29): 106:112
- Usman, Syaikh, Widjajanti I. Suharyo, Bambang Sulaksono, M. Sulton Mawardi, Nina Toyamah, Akhmadi. 2004. *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU
- Wibowo, Gatot Dwi Hendro. 2009. Aspek Hukum Dan Kelembagaan Dalam Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Jurnal Hukum*, Vol. 16, (No. 1): 127 - 144
- Williamson, Oliver E. 2007. Transaction Cost Economics: An Introduction. *Economics Discussion Paper No. 2007-3*
- Yahaya, K.A, Osemene, O.F, and Abdurraheem, A. 2011. Effectiveness of microfinance banks in alleviating poverty in Kwara State Nigeria. *Global Journal of Management and Business Research*, Vol. 9, (No.4): 13-20
- Yustika, Ahmad Erani. 2013. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga